

ABSTRAK

Tesis ini berjudul KEDUDUKAN DESA ADAT DI BALI SEBAGAI SUBYEK HUKUM HAK MILIK ATAS TANAH dengan dua pokok permasalahan yaitu yang pertama yaitu desa adat di Bali sebagai subyek hukum hak milik atas tanah, yang kedua adalah akibat hukum pasca ditetapkannya desa adat di Bali sebagai subyek hukum hak milik atas tanah. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah dengan teori bola salju. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis desa adat di Bali sebagai subyek hukum hak milik atas tanah serta akibat hukum pasca ditetapkannya desa adat di Bali sebagai subyek hukum hak milik atas tanah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa desa adat di Bali bukan merupakan subyek hukum hak milik atas tanah. Serta tanah milik desa adat di Bali yang telah disertifikatkan dengan hak milik atas nama desa adat mengakibatkan tanah tersebut dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dan diatas tanah tersebut dapat diberikan hak guna bangunan dan hak pakai selama mendapatkan persetujuan dari desa adat namun tanah tersebut tidak dapat diwariskan sehingga tidak memenuhi sifat-sifat dari hak miliki atas tanah sebagaimana dalam UUPA.

Kata Kunci : Desa Adat di Bali, Tanah Adat di Bali, Hak Milik Atas Tanah

ABSTRACT

This thesis is entitled POSITIONING ADAT VILLAGE IN BALI AS A LEGAL SUBJECT OF THE RIGHT OF OWNERSHIP with two main issues, first, Adat villages in Bali as the subject of Indonesian land ownership law, second, legal consequences after Adat Village establishment in Bali as subjects of Indonesian land ownership law. This research method uses a normative juridical method, with a statute approach and a conceptual approach using primary legal materials and secondary legal materials processed with snowball theory. The purpose of this study is to analyze Adat villages in Bali as the subject of legal rights to land ownership and legal consequences after the establishment of adat villages in Bali as the subject of legal rights to land ownership. The conclusion of this study is that Adat villages in Bali are not the subject of legal property rights to land. As well as land belonging to Adat villages in Bali that have been certified with ownership rights in the name of Adat villages resulting in the land being transferable to other parties and above the land can be granted building rights (HGB) and right of usage over land (Hak Pakai) while obtaining approval from Adat villages but the land cannot be inherited with the result that does not fulfill the properties of the ownership rights in land from Indonesian Land Laws (UUPA).

Keywords: Adat Villages in Bali, Adat Land in Bali, Property Rights to Land